

IMPLEMENTASI PROGRAM P2WKSS DI KABUPATEN SUMEDANG

Suci Rahmania Arifien^{*1}, Akadun², Anne Friday Safaria³
¹²³Universitas Sebelas April Sumedang

Article Info

Article history:

Received Des 23, 2023
Revised Des 25, 2023
Accepted Des 27, 2023

Keywords:

Public Policy
Implementation program
P2WKSS

ABSTRACT

This research aims to obtain an overview of the implementation of the P2WKSS program in Sumedang Regency. The research method used is a qualitative method using purposive sampling. This research was analyzed using qualitative descriptive research with research informants, Sumedang Regency DPPKBP3A employees. The research was carried out using the Miles and Huberman model with stages including data reduction, data presentation and drawing conclusions. The research results show that it has been implemented quite well in accordance with the dimensions and objectives of the P2WKSS integrated program implementation regulations. Apart from that, other aspects also support P2WKSS activities in Sumedang Regency, such as funding sources, adequate human resources and implementation times that have been arranged in such a way that P2WKSS in Sumedang Regency can be implemented according to the activity schedule with the working group members involved in accordance with their respective main tasks and functions. -each. This cannot be separated from the implementers' openness in accepting and responding well to the existence of the integrated P2WKSS program in Sumedang Regency.



Copyright © 2023 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Suci Rahmania Arifien,
Program Studi Magister Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Jl. Angkrek Situ No 19 Kecamatan Sumedang Utara Sumedang 45322.
Email: sucirahmania63@gmail.com

1. INTRODUCTION

Peran wanita di Indonesia merupakan salah satu hal penting bagi pembangunan bangsa dan negara. Sebagai salah satu bangsa yang berkembang dan kondisi perekonomian nasional yang belum kondusif, perempuan menjadi sangat penting dalam mendukung ekonomi suatu keluarga. Pemenuhan hak ekonomi perempuan semakin dirasakan sebagai salah satu kebutuhan dasar yang mampu mengantarkan kaum perempuan pada suatu tatanan perjuangan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Rendahnya kualitas hidup perempuan akan mempengaruhi indeks pembangunan manusia secara keseluruhan, terutama pada bidang-bidang strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi kita sebagai manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup tidak hanya diperuntukan bagi para laki-laki, perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk membantu pembangunan bangsa kedepannya, khususnya dalam peningkatan peran perempuan, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 41/Kep/Meneg.PP/vii/2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentang pedoman umum Revitalisasi Program Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS). Untuk mendukung keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan tersebut, maka Kementerian dalam Negeri juga mengeluarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 26 tahun 2009 tentang pedoman pelaksanaan program P2WKSS di daerah.

Dalam keberlangsungan implementasi P2WKSS di Kabupaten Sumedang ditemukan kendala-kendala dalam pelaksanaannya, kendala-kendala tersebut diungkapkan oleh narasumber dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang sebagai berikut.

1. Kurangnya tanggung jawab dari pelaksana P2WKSS, dibuktikan dari hasil evaluasi laporan kegiatan P2WKSS tahun 2021 adanya sebagian pihak-pihak lintas sektor yang tidak ikut melakukan pengawasan langsung pada kegiatan P2WKSS karena pengawasan P2WKSS dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas/Instansi lainnya sesuai dengan kebutuhan wilayah;
2. Dilihat dari Indikator Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang Meningkatkan Ekonomi Keluarga pada Tahun 2019 di Renstra DPPKBP3A Kabupaten Sumedang, tercatat masih rendahnya peran perempuan dalam keluarga karena merasa kurang percaya diri dan belum sadar akan potensi yang ia miliki. Ditambah lagi dengan tidak di bekali pengetahuan, keterampilan dan modal membuat perempuan tidak dapat menjalankan peran ikut serta dalam membantu permasalahan keluarga.
3. Pada data hasil “Kabupaten Sumedang Dalam Angka Tahun 2022” kondisi ekonomi masih rendah. Sesuai dengan data yang terdapat pada garis kemiskinan tahun 2021 meningkat menjadi Rp.360.054 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 126.280 atau sebesar 10,71% dibandingkan dengan sebelumnya 10,26%. Hal tersebut disebabkan dengan jenis pekerjaan masyarakat yang mayoritas adalah buruh dan juga berusaha sendiri mengakibatkan masyarakat merasa kurang mampu untuk bisa menghidupi keluarganya dengan layak dan juga memenuhi kecukupan gizi keluarga yang seimbang yaitu dengan asupan makanan ayam, daging, sayur dan ikan.

2. METHOD

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafah *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian ini mengamati tentang Implementasi Program Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Kabupaten Sumedang.

Teknik sampling yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, menurut Sugiyono (2017: 216) mengatakan bahwa, Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Artinya yang menjadi informan disini adalah pegawai-pegawai yang dianggap memiliki otoritas, informasi serta terlibat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang. Berdasarkan teori diatas maka dapat diambil informan sebagai berikut:

Tabel 1. Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Kepala DPPKBP3A Kabupaten Sumedang	1
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1
3.	Kepala UPT Dalduk Wilayah Buahdua-Tanjungkerta	1
4.	TPD Wilayah Tanjungkerta	1
Jumlah		4

3. RESULTS AND DISCUSSION

Berdasarkan hasil analisis data mengenai Implementasi Program Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Kabupaten Sumedang maka peneliti memperoleh data sebagai berikut.

Tabel 2. Kesimpulan Implementasi Program Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Kabupaten Sumedang

No.	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
1.	Ukuran dan Tujuan Kebijakan	a. Realisasi Ukuran Dasar dan Tujuan Kebijakan	Kebanyakan sudah mengetahui, hanya beberapa yang belum mengetahui karena karena unsur utama terealiasasinya program ini adalah pemahaman tujuan dari pelaksanaan programnya itu sendiri, terutama di wilayah yang digunakan sebagai fokus pelaksanaan
		b. Regulasi Ukuran Dasar dan Tujuan	Aturan dalam menentukan ukuran dasar dan tujuan pada Program P2WKSS sudah ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan P2WKSS di Daerah. Peraturan tersebut juga dikeluarkan kembali oleh Gubernur Jawa Barat lalu oleh Bupati Kabupaten Sumedang sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan P2WKSS di Kabupaten Sumedang. Jadi, aturan dan tujuan P2WKSS sudah tertuang di peraturan tersebut.
		c. Garis-Garis Pedoman Program Kebijakan	Dalam penentuan ukuran dasar dan tujuan dari kebijakan P2WKSS sudah tercantum dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Sehingga para pelaksana menjalankan kegiatan P2WKSS harus sesuai dengan pedoman atau peraturan yang telah tersedia.
2.	Sumber-Sumber Kebijakan	a. Dana	Memaksimalkan dana APBD yang diajukan setahun sebelum P2WKSS dilaksanakan. Selain mengandalkan dari APBD, mengupayakan juga pihak CSR untuk mendukung keberlangsungan kegiatan P2WKSS. Dana yang berasal dari APBD tersebut digunakan ke lokus P2WKSS.
		b. Sumber Daya Manusia	Kondisi sumber daya manusia yaitu pelaksana kegiatan program P2WKSS sudah cukup berkompeten. Mereka berusaha mewujudkan dan mengembangkan program tersebut sesuai dengan tanggungjawab masing-masing serta sesuai dengan aturan yang berlaku.

		c. Waktu	Mengatur waktu pelaksanaan P2WKSS ditentukan pada Rapat Koordinasi bersama Bupati dan juga instansi terkait. Selain membahas waktu pelaksanaan, pada rakor tersebut juga membahas ide atau kegiatan apa yang akan instansi tersebut lakukan untuk menunjang kegiatan P2WKSS di lokasi sasaran atau di desa binaan.
3.	Karakteristik Badan-Badan Pelaksana	a. Struktur Birokrasi	Struktur birokrasi pelaksanaan P2WKSS sudah tercantum pada Surat Keputusan yang dikeluarkan Bupati. Isinya mulai dari penanggungjawab, ketua hingga anggota kelompok kerja yang terlibat dalam pelaksanaan P2WKSS di desa binaan.
		b. Peran Serta Pelaksana dalam Sistem Penyampaian Isi Kebijakan	Peran serta pelaksana dalam penyampaian program P2WKSS sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyampaikan informasi mengenai P2WKSS dengan baik kepada kelompok sasaran sesuai dengan tujuan dari program P2WKSS di Kabupaten Sumedang.
4.	Kecenderungan Pelaksana (Implementor)	a. Pemahaman Kebijakan	Sebagian pelaksana ada yang sudah memahami tentang program P2WKSS, ada yang belum. Mereka yang belum memahami dikarenakan tidak mengetahui siapa yang mempunyai tanggungjawab penuh pada kegiatan tersebut. Namun, mereka juga berusaha untuk belajar memahami seiring dengan berjalannya kegiatan program P2WKSS di Kabupaten Sumedang.
		b. Tanggapan (Penerimaan, Netralitas, Penolakan)	Pelaksana harus siap mengikuti walaupun terasa berat melimpahkan berbagai kegiatan dan program kepada pelaksana teknis di lapangan yang sejatinya selalu berusaha semaksimal mungkin merealisasikan dengan penuh tanggungjawab, berinovasi dan berimprovisasi agar program yang berjalan dapat terealisasi dengan mudah dan selaras, karena sudah ada SOP dan peraturan
		c. Intensitas Tanggapan	Pelaksana mempersiapkan hal-hal yang menjadi atau yang diperlukan untuk keberlangsungan kegiatan tersebut. Seperti menunjuk desa binaan yang akan dijadikan desa binaan P2WKSS, melakukan koordinasi ke desa binaan. Namun masih saja ditemukan SKPD yang terlibat tidak menjalankan salah satu kegiatan yang sudah diisi pada blanko kegiatan.
5.	Komunikasi Antar Organisasi	a. Ketepatan Komunikasi	Komunikasi dalam penyampaian program P2WKSS baik dari pimpinan Pemerintah Daerah kepada SKPD, lalu SKPD kepada desa binaan sudah cukup tepat. Namun, dari segi pelaksanaannya masih ada SKPD yang tidak menjalankan kegiatan sesuai dengan isian blanko pada saat rakor.
		b. Konsistensi dalam Komunikasi	Penyampaian program P2WKSS sudah konsisten dengan terlebih dahulu menentukan konsep dan bentuk kegiatan yang dapat

			meningkatkan pemberdayaan Perempuan di desa binaan tersebut. Penentuan konsep dalam setiap kegiatan tersebut bertujuan agar kegiatan ini tetap konsisten dan juga tidak ada penyimpangan dari aturan yang sudah ditentukan.
6.	Kondisi-Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik	a. Faktor Pendukung dalam Implementasi	Berlangsungnya kegiatan ini mengandalkan dana dari APBD dan juga CSR, walaupun pada kenyataannya masih ada pihak Kecamatan mau Desa yang dijadikan sasaran mengeluh dengan dana. Akan tetapi kegiatan P2WKSS ini jika diikuti oleh masyarakat dengan baik akan mengubah kondisi ekonomi dan juga sosial bagian kehidupan mereka terutama perempuan karena sasaran dari P2WKSS adalah perempuan. Program P2WKSS tersebut melakukan pemberdayaan dan juga pembinaan kepada perempuan agar dapat hidup mandiri dan tidak bergantung kepada laki-laki sebagai kepala rumah tangga.
		b. Sifat Pengikut/Partisipan	Program P2WKSS merupakan program dari Pemerintah Pusat yang menjadikan seluruh pemerintah daerah, SKPD, pemerintah kecamatan, desa dan juga masyarakat yang dijadikan sasaran mendukung kegiatan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan Implementasi program P2WKSS sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari dimensi ukuran dan tujuan kebijakan yang mana pelaksana atau SKPD yang terlibat dan juga yang menjalankan program tersebut sudah mengetahui dan paham mengenai aturan, tujuan dan ukuran dasar dari P2WKSS. Aturan tersebut juga sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 tentang pedoman pelaksanaan P2WKSS di Daerah dan tercantum juga dalam Peraturan Bupati Sumedang tentang pelaksanaan P2WKSS di Kabupaten Sumedang.

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan menurut Van Meter dan Van Horn (Agustino 2020: 151) bahwa "Identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran dasar dan tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran dasar dan tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh."

Kemudian dimensi sumber-sumber kebijakan pada implementasi program P2WKSS di Kabupaten Sumedang sudah cukup baik bahwa dalam pelaksanaan program P2WKSS aspek-aspek pendukung sudah dapat terpenuhi seperti dana, sumber daya manusia dan juga waktu pelaksanaan. Seperti yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn bahwa Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Selain itu keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan sumber daya manusia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.

Selanjutnya dimensi karakteristik badan-badan pelaksana dalam implementasi program P2WKSS sudah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut didukung oleh struktur birokrasi yang mana susunan tanggungjawab pelaksana sudah tercantum dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Sumedang dari mulai penanggungjawab, ketua hingga anggota kelompok kerja yang terlibat dalam pelaksanaan P2WKSS di Kabupaten Sumedang, sehingga pelaksana program tersebut dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan tupoksi. Selain itu peran serta pelaksana dalam penyampaian isi program P2WKSS dengan maksimal sesuai dengan tujuan program tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Subekti, Faozanudin, Rokhman, (2017:67) "Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas implementasi. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan". Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Mustari (2011:21) "Bertanggungjawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri dan masyarakat".

Kemudian kecenderungan pelaksana (implementor) sudah dilakukan cukup baik dapat dilihat pada dimensi tanggapan. Pada tanggapan yang sudah terpenuhi yaitu pelaksana semaksimal mungkin merealisasikan program P2WKSS dengan penuh tanggungjawab, berinovasi dan berimprovisasi agar P2WKSS dapat dilaksanakan selaras sesuai dengan SOP. Kemudian dalam pemahaman kebijakan masih ditemukan Sebagian pelaksana yang belum memahami tentang program P2WKSS dikarenakan tidak mengetahui siapa yang mempunyai tanggungjawab penuh pada kegiatan tersebut. Namun, mereka juga berusaha untuk belajar memahami siring dengan berjalannya program tersebut dan dalam intensitas tanggapan program masih ditemukan SKPD yang tidak menjalankan salah satu kegiatan yang sudah diisi pada blanko kegiatan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi program P2WKSS di Kabupaten Sumedang secara keseluruhan dapat dikatakan cukup baik sehingga masih harus adanya perbaikan dalam melaksanakan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Aryani, Hakim, Noor, (2014:16) “Sikap para pelaksana yaitu sikap atau tindakan yang ditunjukkan oleh para pelaksana kebijakan dalam proses implementasi program”. Sehingga sikap para pelaksana kebijakan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan program yang telah direncanakan sebelumnya.

Selanjutnya komunikasi antar organisasi dalam implementasi program P2WKSS di Kabupaten Sumedang sudah dilaksanakan cukup baik, hal tersebut didukung oleh konsistensi dalam komunikasi yang mana penyampaian program P2WKSS sudah konsisten dengan menentukan konsep kegiatan yang dapat meningkatkan pemberdayaan perempuan, namun pada ketepatan komunikasi dalam pelaksanaannya masih ada SKPD yang tidak menjalankan kegiatan sesuai dengan pada saat rapat koordinasi.

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih dibutuhkan perbaikan secara terus menerus, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sudrajat, dkk (2019:65) bahwa “Komunikasi dapat menjadi saran-saran guna terciptanya ide-ide bersama, memperkuat perasaan kebersamaan melalui tukar-menukar pesan (informasi), menggambarkan emosi dan kebutuhan mulai dari yang paling sederhana sampai yang kompleks”. Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Purwadarminta (Latief, dkk (2021:108) “Kerjasama adalah kegiatan atau tindakan yang saling membantu dan dilakukan secara bersama-sama”.

Kemudian kondisi ekonomi, sosial dan politik dalam implementasi program P2WKSS sudah dilaksanakan dengan baik, hal tersebut didukung oleh beberapa aspek yaitu faktor pendukung dalam implementasi program P2WKSS ini berlangsung dengan mengandalkan dana APBD dan juga CSR, serta dapat memberikan perubahan kondisi ekonomi dan juga sosial bagi kehidupan mereka terutama perempuan, dan aspek pengikut atau partisipan yang mana seluruh pemerintah daerah, SKPD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan juga masyarakat menjadi sasaran untuk mendukung kegiatan P2WKSS di Kabupaten Sumedang.

Table 3. Kesimpulan Hambatan Implementasi Program Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Kabupaten Sumedang

No.	Hambatan	Kesimpulan
1.	Persiapan Pelaksanaan P2WKSS	Hambatan dalam persiapan pelaksanaan P2WKSS yaitu pada saat penentuan lokasi sasaran yang mana harus merujuk dan memilih daerah kampung KB, sedangkan masih banyak desa yang membutuhkan sentuhan untuk diberdayakan dalam pemberdayaan perempuan, dan tidak semua kampung KB menghasilkan keluaran sesuai dengan tujuan kegiatan. Selain itu juga tidak jarang desa yang akan menjadi sasaran menolak kegiatan tersebut dengan alasan minimnya dana serta partisipasi masyarakat yang kurang.
2.	Komunikasi Antar Organisasi	Hambatan yang muncul adalah SKPD yang terlibat tidak menjalankan kegiatan sesuai dengan isian blanko. Selain itu juga kegiatan sosialisasi program selalu mendekati dengan pelaksanaan sehingga pihak desa sasarannya pun sulit untuk koordinasi.
3.	Kondisi Tanggapan Masyarakat Sosial	Program P2WKSS belum banyak diketahui oleh masyarakat karena masih adanya masyarakat yang pasif dengan tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang datang dari pemerintah. Jikapun ada partisipasi dari masyarakat, mereka hanya datang, duduk, melihat dan juga mendengar tidak ada yang dicatat satupun serta mereka juga masih menganggap bahwa program tersebut hanya mengurus tentang KB, posyandu dan PKK yang tujuannya pada kader bukan masyarakat luas.

Berdasarkan tabel di atas, implementasi program P2WKSS di Kabupaten Sumedang secara keseluruhan hambatan yang terjadi merupakan hambatan yang masih bisa diatasi atau diselesaikan dengan baik. Pada dimensi sumber-sumber kebijakan yang memiliki hambatan dalam mempersiapkan pelaksanaan P2WKSS

yang berkaitan dengan anggaran juga penentuan lokasi sasaran, sebagaimana pendapat menurut Sulistyowati (2021:78) “SDM merupakan manusia yang dipekerjakan disebuah instansi sebagai penggerak, pemikir dan perencanaan untuk mencapai tujuan organisasi”.

Selanjutnya hambatan dimensi komunikasi antar organisasi, yang mana hambatan yang muncul adalah SKPD yang terlibat tidak menjalankan kegiatan sesuai dengan isian blanko. Selain itu juga kegiatan sosialisasi program selalu mendekati dengan pelaksanaan sehingga pihak desa sasarannya pun sulit untuk koordinasi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Widjaja (Arini dkk, 2022:348) bahwa “Sosialisasi program merupakan proses mengkomunikasikan program-program perusahaan kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan pengenalan dan penghayatan dalam lingkungan tertentu”. Sehingga sosialisasi kebijakan salah satu hal yang penting dalam implementasi untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan.

Kemudian dimensi kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik dari segi kondisi sosial partisipasi masyarakat seperti Program P2WKSS belum banyak diketahui oleh masyarakat karena masih adanya masyarakat yang pasif dengan tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang datang dari pemerintah. Jikapun ada partisipasi dari masyarakat, mereka hanya datang, duduk, melihat dan juga mendengar tidak ada yang dicatat satupun serta mereka juga masih menganggap bahwa program tersebut hanya mengurus tentang KB, posyandu dan PKK yang tujuannya pada kader bukan masyarakat luas.

Terjadinya hambatan-hambatan tersebut dapat dipastikan tidak terlalu berpengaruh secara signifikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat karena setiap terjadi hambatan yang terjadi langsung mencari solusi untuk mengupayakan yang terbaik dalam memberikan pelayanannya.

Table 4. Kesimpulan Upaya dalam Mengatasi Hambatan Implementasi Program Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Kabupaten Sumedang

No.	Hambatan	Kesimpulan
1.	Persiapan Pelaksanaan P2WKSS	Dalam pemilihan desa binaan tidak harus selalu memilih desa kampung KB, karena masih banyak desa-desa lain yang lebih siap dan harus lebih diperhatikan untuk dikembangkan melalui program P2WKSS tersebut. Selain itu selalu melakukan sosialisasi pada saat sebelum kegiatan dilaksanakan, agar masyarakat dapat berpartisipasi mengikuti kegiatan P2WKSS
2.	Komunikasi Antar Organisasi	Selalu konsisten dengan kegiatan yang telah diusulkan dan disepakati. Apabila kegiatan tersebut berbarengan dengan kegiatan lain, kembali dijadwalkan agar kegiatan P2WKSS dapat dilaksanakan. Selain itu selalu melakukan komunikasi baik dengan SKPD maupun pemerintah desa setempat yang dijadikan desa binaan.
3.	Kondisi Sosial Tanggapan Masyarakat	Selalu mengadakan sosialisasi serta melaksanakan pembinaan agar masyarakat dapat mengubah kesejahteraan hidupnya.

Berdasarkan tabel di atas, dalam upaya Implementasi Program P2WKSS di Kabupaten Sumedang secara keseluruhan upaya yang dilakukan tersebut sudah mulai sedikit-sedikit dilaksanakan. Pada persiapan pelaksanaan P2WKSS berupaya untuk memilih desa binaan tidak harus selalu desa kampung KB, dan selalu melakukan sosialisasi pada saat sebelum kegiatan dilaksanakan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Aisah, dkk (2021:134) “Implementasi kebijakan akan berhasil jika diawali dengan komunikasi dalam bentuk sosialisasi, menyampaikan tujuan kebijakan, melibatkan kelompok sasaran serta dukungan finansial yang tinggi”.

Selanjutnya upaya dalam komunikasi organisasi yaitu dengan selalu konsisten dengan kegiatan yang telah diusulkan dan disepakati, selalu melakukan komunikasi baik dengan SKPD maupun pemerintah desa setempat yang dijadikan desa binaan. Hal tersebut serupa dengan penjelasan sebelumnya yang dijelaskan oleh Aisah, dkk (2021:134) “Implementasi kebijakan akan berhasil jika diawali dengan komunikasi dalam bentuk sosialisasi, menyampaikan tujuan kebijakan, melibatkan kelompok sasaran serta dukungan finansial yang tinggi”.

Kemudian kondisi sosial tanggapan masyarakat berupaya dengan selalu melaksanakan pembinaan agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam program kegiatan yang dibuat oleh pemerintah untuk dapat mengubah taraf hidup perempuan menjadi lebih baik dan juga mandiri.

4. CONCLUSION

Implementasi program P2WKSS di Kabupaten Sumedang sudah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan ukuran dan tujuan dari peraturan pelaksanaan program terpadu P2WKSS. Selain itu aspek-aspek lainnya pun mendukung kegiatan P2WKSS di Kabupaten Sumedang seperti sumber dana, sumber daya manusia yang memadai dan waktu pelaksanaan yang sudah diatur sedemikian rupa agar P2WKSS di Kabupaten Sumedang dapat terlaksanakan sesuai jadwal kegiatan dengan anggota kelompok kerja yang

terlibat sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Hal tersebut tidak terlepas dari keterbukaan pelaksana dalam menerima dan menanggapi dengan baik adanya program terpadu P2WKSS di Kabupaten Sumedang.

Dalam persiapan pelaksanaan P2WKSS terdapat hambatan yaitu dalam penentuan lokasi sasaran yang masih sulit dan pada akhirnya selalu memilih desa Kampung KB, sedangkan masih banyak desa-desa yang membutuhkan pemberdayaan terhadap perempuan. Selain itu juga komunikasi antar organisasi sering mengalami hambatan karena kurang aktifnya koordinasi sehingga masih ada SKPD yang tidak menjalankan kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan pada awal perencanaan. Kondisi sosial dari segi tanggapan masyarakatpun masih ditemukan hambatan yang ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui program P2WKSS yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pelaksana.

Dalam implementasi program P2WKSS tidak terlepas dari faktor upaya atau pendorong untuk mengatasi suatu hambatan diantaranya, selektif dalam pemilihan lokasi binaan, lalu melakukan sosialisasi pada saat sebelum kegiatan dilaksanakan agar masyarakat yang menjadi sasaran bisa aktif berpartisipasi dalam program tersebut. Selain itu koordinasi yang konsisten harus terus ditingkatkan agar kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan.

REFERENCES

- Aminudin, A. (2018). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kota Bandung. Tesis pada Universitas Padjadjaran.
- Anggraini. (2015). "Implementasi Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (studi pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo)". [Online]. Tersedia: <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/117300/> [23 Mei 2023].
- Agustino, Leo. 2020. Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi ke-2). Bandung: Alfabeta.
- Akadun, 2019. Administrasi Perusahaan Negara. Bandung: Alfabeta.
- Alamsyah, Kamal. 2016. Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi. Bandung: Media Citra Mandiri Press.
- Anggara, Sahya. 2014. Ilmu Administrasi Negara. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak.
- Edward III, George, C. 1980. Implementing Public Policy. Washington DC, Congressional Quarterly Press.
- Ekowati, Mas. Roro. 2019. Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis). Surakarta, Pustaka Cakra.
- Hamroh, Amoh. (2013). "Implementasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Kelurahan Cikerei Kecamatan Cibeber Kota Cilegon". Skripsi pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Handyaningrat, S. 2014. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta, PT. Gunung Agung.
- Hardiyanti, Inne., Titi Stiawati., dan Ika Arinia Indriyany. (2019). "Evaluasi Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Serang Tahun 2017". Vol. 1, (1), 1.
- Haris, H. 2019. Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta, Salemba Humanika.
- Hasibuan, M. S. P. 2014. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah (Edisi Revisi). Jakarta, Gunung Agung.
- Islamy, Irfan. 2016. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Iskandar, J. 2018. Kapita selekta Administrasi Negara dan Kebijakan Publik. Bandung, Puspaga.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 2022. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Sumedang, Universitas Sebelas April.
- Naelasari, Desy. 2019. Implementasi Pendidikan Life Skill dalam Pembentukan Kemandirian Santri. [Online]. Tersedia: <http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/dar/article/view/1325>. [05 April 2023].
- Rahmadani, Amalia Ilham. dan Seno Andri. (2020). "Evaluasi Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Kampar Provinsi Riau". Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
- Silalahi, U. 2015. Studi tentang Ilmu Administrasi (Konsep, Teori dan Dimensi) (Edisi Revisi). Bandung, Sinar Baru Algensindo.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung, Alfabeta.
- Thoha, M. 2015. Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Yogyakarta, UGM.
- Subarsono. 2004. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi). Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.
- Paparan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera.